

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI DINAS PERDAGANGAN,  
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Tery (1465142002)

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email: [tervjohn0@gmail.com](mailto:tervjohn0@gmail.com)

**ABSTRAK.** *Pemberdayaan Usaha Mikro Di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak Muhammad Guntur dan Ibu Herlina Sakawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar yang hasilnya adalah cukup efektif. Artinya metode-metode pemberdayaan yang digunakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar sudah efektif dan sudah dapat memberdayakan beberapa usaha mikro di Kabupaten Selayar, akan tetapi masih perlu adanya metode baru untuk beberapa aspek pemberdayaan usaha mikro lebih maksimal.*

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Usaha Mikro

## **1. PENDAHULUAN**

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa tahun belakangan ini akibat pengaruh melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing, tidak terlepas dari kekeliruan pemerintah dalam menerapkan strategi pembangunan, yang begitu menitik beratkan pada pembangunan ekonomi dengan target pertumbuhan yang tinggi. Kebijakan yang lebih berarah pada pembangunan usaha dengan skala yang besar justru tambah melemahkan sistem perekonomian nasional.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 tentang perekonomian, yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”<sup>1</sup> Karena perekonomian secara keseluruhan

diamanatkan untuk disusun berdasarkan asas kekeluargaan, maka seluruh lini dan bagian dalam perekonomian Indonesia seharusnya juga disusun dengan asas tersebut. Artinya, pada tingkat dunia usaha, asas kekeluargaan seharusnya diamalkan pula oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.<sup>2</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 tentang perekonomian

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Republik Indonesia Nomor 18/PER/M.KUMKM/IX/2015 tentang pedoman pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah yang menyatakan bahwa “dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.”<sup>3</sup>Sumberdaya manusia sangat penting perannya dalam proses menjalankan usaha, karena di butuhkan kreatifitas, manajemen usaha serta strategi pemasaran produk.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah bahwa bahwa “Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diberdayakan dengan memberikan peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Selayar”.<sup>4</sup>

Pada kenyatannya, sektor UMKM mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam menghadapi masa kritis ini. Kontribusi sektor UMKM pada perekonomian nasional juga sudah cukup signifikan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, makin banyak masyarakat yang memulai usaha sendiri. Jumlah wirausaha baru di Indonesia naik menjadi 3,1% dari jumlah penduduk dalam tiga tahun Pemerintahan Presiden Jokowi.

---

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18/PER/M.KUMKM/IX/2015

<sup>4</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Permasalahan yang terjadi yaitu pada saat sebelum terjadinya krisis, dimana Pemerintah kurang memperhatikan sektor UMKM. Pada saat itu, dana dan daya dari pemerintah hanya lebih di fokuskan kepada kelompok usaha besar. Ketika terjadinya krisis, sebagian besar dari kelompok usaha besar ini mengalami kerugian yang sangat besar, dan pada saat yang bersamaan justru sektor UMKM yang relatif dapat bertahan. Banyak dari pengusaha besar yang mengalami kerugian besar akibat usaha yang dibangun begitu besar dengan hutang, sehingga pada saat krisis terjadi, maka mereka tidak mampu lagi membayar hutang – hutang yang sudah jatuh tempo, belum lagi hutang bahan baku yang dipakai berbasis mata uang asing. Situasi lain yang melanda saat krisis yaitu harga bahan baku yang begitu tinggi sedangkan kemampuan dari daya beli masyarakat yang terus menurun. Berbeda dengan situasi yang dialami oleh para pelaku UMKM yang cenderung lebih bisa bertahan dengan mengandalkan sumber daya lokal dan tidak di topang dana pinjaman dari pihak Bank.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian suatu negara maupun suatu daerah. UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam laju perekonomian masyarakat.

Dengan segala keterbatasannya, para pelaku UMKM sangat perlu difasilitasi, digerakkan dan dimotivasi sehingga kemauan dan kemampuan kewirausahaannya semakin berkembang. Penguatan UMKM di sektor manajemen dan permodalan diharapkan mampu menjawab dan merespon kebutuhan masyarakat. Dengan upaya ini, sehingga UMKM sedikit banyak akan terbantu dalam menyelesaikan permasalahan dari usahanya.

Di tingkat Kabupaten, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah

UMKM setelah penetapan RPJMD oleh Bupati terpilih pada tahun 2016, jumlah pelaku UMKM sudah mencapai 11457 pelaku usaha.

Dalam rencana penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada sektor usaha mikro. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karakteristik usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>5</sup>

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah berusaha sebisa mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat penyediaan berbagai kesempatan berusaha di bidang usaha mikro dengan beberapa bimbingan dan pelatihan-pelatihan dari pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha-usaha mikro yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Akan tetapi usaha tersebut justru terkendala dari pihak usaha mikro itu sendiri.

Hasil Penelitian (Guntur, 2015) Menjelaskan Bahwa The effectiveness of small business empowerment program policy, entrepreneurship motivation and entrepreneurial competence has a significant relationship to the performance of small businesses. If the government runs a small business empowerment program through the creation of a business climate that is supported by the motivation of

entrepreneurship and entrepreneurial competencies, the performance of small businesses will increase. Relating to the environmental aspects (business climate)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan pengembangan terhadap sektor usaha mikro yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan observasi sementara yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa masih banyak dari usaha mikro mengalami keterbatasan baik itu dari segi modal, kreatifitas, bahkan teknologi. Hal ini dapat di lihat dari produk yang di tawarkan masih menggunakan kemasan plastik bening yang diberi kertas bertuliskan jenis produk dan nama usaha yang di tawarkan dan menutupnya dengan cara di bakar di lilin pada setiap sisinya, serta pemasaran yang belum merambah pasar online.

Untuk itu, diperlukan sebuah arah untuk meninjau kembali langkah atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar guna untuk tercapainya target pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan melihat permasalahan yang ada mengenai pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar”**.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Perindustrian,

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar?”

### **3. TUJUAN PENELITIAN**

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui sejauh mana Pemberdayaan Usaha Kecil di Dinas Koperasi Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **4. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **a. Konsep Pemberdayaan**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa pengertian pemberdayaan adalah sebagai berikut:

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.<sup>6</sup>

Menurut Makmur (2011: 228) yang dimaksud pemberdayaan adalah sebagai berikut:

Pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk menciptakan perubahan suatu keadaan lingkungan kehidupan manusia dengan menggunakan kemampuan dan kekuatan energi dalam rangka meraih tujuan kehidupan dalam rangka meraih tujuan kehidupan yang mereka telah cita-citakan sebelumnya.<sup>7</sup>

Untuk mewujudkan tercapainya pemberdayaan usaha mikro yang merupakan

fokus dalam penelitian ini yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kepulauan Selayar, maka terdapat beberapa pendekatan pemberdayaan yang dapat dicapai agar tujuan pemberdayaan usaha mikro dapat tercapai dengan efektif. Pendekatan Pemberdayaan melalui 5P menurut Suharto (2017: 67-68) lebih jelasnya dideskripsikan sebagai berikut :

#### **1) Pemungkinan,**

Pemungkinan yaitu, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Indikator dari pemungkinan ini yaitu Penyediaan lokasi dan Pemberian Izin Usaha.

#### **2) Penguatan**

Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Indikator dari tahap penguatan ini yaitu pemberian pelatihan kewirusahaan dan bantuan permodalan

#### **3) Perlindungan**

Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok

lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Indikator dari tahap perlindungan ini yaitu Perlindungan dari gangguan dari usaha besar dan preman dan pengontrolan harga bahan baku.

#### **4) Penyokongan**

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Indikator dari tahap ini yaitu bantuan dalam bentuk dana atau peralatan dan bantuan pemasaran lokal.

#### **5) Pemeliharaan**

Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Indikator dalam tahap ini yaitu pembagian kekuasaan antar pelaku

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<sup>7</sup>Makmur. 2015.

Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama, Hal. 228

usaha dan menjaga keseimbangan pasar.<sup>8</sup>

#### **b. Pengertian Usaha Mikro**

Usaha Mikro merupakan salah satu usaha yang sangat berkembang di Indonesia. Usaha Mikro bahkan menjadi salah satu sumber ekonomi baru di Indonesia. Selain itu, Usaha Mikro merupakan salah satu dari berbagai jenis usaha-usaha di Indonesia yang mampu bertahan dari guncangan krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat ini. Maka dari itu, sudah menjadi suatu keharusan untuk terus memperkuat dan memberdayakan sektor usaha mikro ini. Menurut Zimmerer, dkk, “bahwa pemilik usaha mikro sering kali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan paling dipercaya”.<sup>9</sup> Banyak buku dan para ahli yang mengungkapkan tentang pengertian usaha Mikro. Sebagian besar menjabarkannya dengan melihat jumlah modal dan tenaga kerja yang di pakai.

Menurut Tambunan, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha mikro adalah suatu badan usaha yang berdiri sendiri, milik pribadi atau perorangan serta warga negara Indonesia, memiliki tenaga kerja antara

1 sampai 4 orang dan memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta rupiah per tahun.

#### **c. Karakteristik Usaha Mikro**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 ayat 2:

Kriteria usaha mikro sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>11</sup>

Kriteria usaha mikro sebagai berikut :

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- 6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.

#### **d. Pemberdayaan Usaha Mikro**

Upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengingat UMKM merupakan salah satu bidang yang dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia. Menilik dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

---

<sup>8</sup>Suharto, Edi. 2017

Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama, Hal. 67-68

<sup>9</sup>Zimmerer, Thomas W. dkk. 2008. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. Jakarta: Salemba Empat, Hal. 14

<sup>10</sup>Tambunan, Tulus T.H. 2017. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 3

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada Bab V Pasal 52 Ayat (1) bahwa sebagai berikut:

Koodinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mewujudkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang tangguh dan mandiri.<sup>12</sup>

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bab III Pasal 4 yaitu sebagai berikut:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.<sup>13</sup>

**e. Program Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar**

Sebagaimana diketahui, permasalahan saat ini pada umumnya di Kabupaten Kepulauan Selayar kebanyakan pelaku

khususnya pada usaha mikro yaitu, pemanfaatan teknologi, keterbatasan teknik produksi dan manajemen, dan sulitnya pemasaran. Misalnya dari segi inovasi, yang dapat melonjakkan daya saing dalam pemasaran produk. Pelaku usaha mikro harus memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi pada produk jualannya, seperti inovasi pada pembungkus produk hingga teknik pemasaran yang merambah pasar online sehingga konsumen lebih tertarik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar mengeluarkan program pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

- 1) Legalisasi usaha mikro, kecil dan menengah
- 2) Pengembangan SDM kewirausahaan bagi pelaku UMKM
- 3) Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal
- 4) Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
- 5) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan di daratan dan kepulauan.
- 6) Pengembangan jaringan UMKM berbasis teknologi informatika
- 7) Pelatihan peningkatan mutu hasil produksi.

**5. KERANGKA KONSEPTUAL**

Agar usaha mikro di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan dengan baik, maka untuk melihat pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Kepulauan Selayar dilihat dengan prinsip 5P yaitu: 1) Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. 2) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, 3) Perlindungan, melindungi masyarakat

<sup>12</sup>PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2013 tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil danMenengah.

<sup>13</sup>Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil danMenengah.

terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. 4) Penyokongan, pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan, dan 5) Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

## 6. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian tipe deskriptif adalah mendiskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Guna mendapatkan fenomena yang lebih mendalam maka digunakan metode kualitatif.

Menurut Anggara (2015: 30), “dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.”<sup>14</sup> Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengetahui dan mengungkap sesuatu dibalik realita yang belum diketahui atau yang baru sedikit diketahui.

## 7. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis yang dilakukan secara terus menerus baik dalam proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menurut Miles, Huberman dan Saldana (Djam'an dan Komariah, 2014: 218-220) yaitu Interactive Model yang mengklasifikasikan analisis data dalam

tiga langkah yaitu Kondensasi Data (Data Condensation), penyajian data (Data Display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion: Drawing/Verification), untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

### a. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

### b. Penyajian Data (Data Display)

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>15</sup>

## 8. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar dan pelaku usaha

---

<sup>14</sup>Anggara, sahya. 2015. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 30

---

<sup>15</sup>Satori, Djam'andan Komariah, Aan. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, Hal. 218-220

kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar, usaha kecil didalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar yang terus berbenah dan terus berusaha mengembangkan dan memberdayakan UMKM di Kabupaten Kepulauan Selayar. Para pelaku usaha kecil merupakan masyarakat lokal Kabupaten Kepulauan Selayar. Mereka memanfaatkan segala bantuan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga usahanya bisa berkembang.

Untuk mengetahui pembahasan atas hasil analisis tentang bagaimana pemberdayaan usaha kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka peneliti menggunakan teori pemberdayaan 5P dari Suharto (2017: 67-68) tentang pendekatan pemberdayaan yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan, untuk lebih jelasnya 5 pendekatan tersebut sebagai berikut:

### **1. Pemungkinan**

Pemungkinan yang dimaksudkan yaitu diciptakannya suatu suasana atau iklim yang memungkinkan bagi para pelaku usaha mengembangkan potensinya secara optimal lewat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat sehingga pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti yang menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sangat mampu bersaing dengan para pengusaha besar lainnya. Dengan adanya daya saing yang besar tersebut, maka masyarakat berinisiatif membangun usaha sendiri dan mengembangkannya melalui bantuan-bantuan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi

dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dari pengembangan usaha kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar itu pula sehingga telah banyak memberikan perubahan dari masyarakat sekitar yang sebelumnya di dominasi oleh petani dan pelaut, hingga kini mendapat tambahan penghasilan dari usaha yang dibangunnya lewat bantuan-bantuan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **2. Penguatan**

Penguatan dimaksudkan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha kecil, dimana mereka masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan lain sebagainya. Menanggapi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha kecil, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar lewat programnya, memberikan penguatan kepada para pelaku usaha dengan cara memberikan beberapa macam pelatihan-pelatihan dan sosialisasi. Pelatihan yang diberikan bermacam-macam mulai dari pemasaran produk hingga pemanfaatan teknologi. Pelatihan tersebut bertujuan agar pelaku usaha tau bagaimana tata cara melayani konsumen agar tertarik membeli produknya serta bagaimana para pelaku usaha dapat merambah dan memanfaatkan pasar online sehingga produk yang ditawarkan dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Pihak Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar sudah berupaya sebisa mungkin dengan memberikan berbagai pelatihan dari beberapa jenis usaha kecil yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar seperti pelatihan pembuatan kue, pelatihan menjahit



hingga pelatihan pemasaran produk bagi para pelaku usaha sehingga produk mereka dilirik oleh para konsumen daerah maupun luar daerah.

### **3. Perlindungan**

Perlindungan yaitu memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha kecil dari berbagai acaman. Perlindungan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar diberikan kepada pelaku usaha agar mereka merasa nyaman dan aman dari gangguan pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada pelaku usaha terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Perlindungan juga dimaksudkan agar usaha yang lebih kecil terhindar dari persaingan yang tidak seimbang dengan perusahaan besar serta para pelaku usaha terhindar dari segala bentuk diskriminasi yang dapat merusak berbagai kelompok usaha.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki peranan penting dalam tahap perlindungan yang merupakan salah satu dari proses pemberdayaan UMKM sesuai dengan tugas pokoknya yaitu memberikan perlindungan kepada Koperasi dan UMKM. Tahap ini menitik beratkan peran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan akses keadilan serta melindungi para pelaku usaha agar terhindar dari segala ancaman yang dapat merusak usaha mereka.

### **4. Penyokongan**

Penyokongan merupakan adanya bantuan dalam bentuk dana maupun peralatan yang diberikan kepada pelaku usaha kecil baik itu dari pemerintah daerah, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar maupun dari pihak Perbankan agar usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha kecil dapat

selalu berkembang hingga menjadi usaha yang lebih besar.

Tahap penyokongan ini merupakan salah satu dari proses pemberdayaan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar agar mampu menyokong para pelaku usaha sehingga tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

### **5. Pemeliharaan**

Pemeliharaan yaitu adanya peran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyeimbangkan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok usaha kecil, seperti pelaku usaha kecil harus selalu dapat berkoordinasi yang baik dengan pelaku usaha menengah, dan para pelaku UMKM lainnya serta saling berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat.

Pemeliharaan merupakan tahap akhir dari suatu proses pemberdayaan dimana dari pemeliharaan ini diharapkan mampu menjamin keselarasan serta keseimbangan yang memungkinkan setiap pelaku usaha memperoleh kesempatan besar untuk mengembangkan usahanya. Dalam hal ini membahas bagaimana peran dari Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM dalam mengatur para pelaku UMKM yang kapasitasnya kecil-mikro kebawah dan menengah keatas serta pembagian kelompok-kelompok usaha sehingga terbangun koordinasi antar berbagai kelompok usaha dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM.

### **9. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikategorikan telah berjalan

efektif. Hal ini dapat dilihat dari setiap komponen pada aspek yang dijadikan sebagai tolok ukur dari penelitian ini, mulai dari aspek pemungkinan dengan hasil yang efektif, aspek penguatan dengan hasil kurang efektif, aspek perlindungan dengan hasil yang efektif, aspek penyokongan dengan hasil yang efektif dan aspek pemeliharaan dengan hasil yang efektif. Berdasarkan kelima aspek tersebut yang mayoritas menunjukkan hasil efektif, sehingga dapat dipahami bahwa proses pemberdayaan usaha kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar sudah berjalan dengan cukup efektif.

#### **10.DAFTAR PUSTAKA**

Sumber Buku:

- Anggara, Sahya. 2015. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Pustaka Setia.
- Hubeis, Musa. 2009. Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Iwantono, Sutrisno. 2002. Kiat Sukses Berwirausaha. Jakarta: Grasindo.
- Irianto, Yusuf. 1996. Industri Kecil Dalam Perspektif Pembinaan dan Pengembangan. Surabaya: Airlangga Universitas Press
- Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2004. Pelaksanaan Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha KUMKM. Jakarta: Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Guntur, Muhammad. 2015, An Effectiveness of Small Business Empowerment Policy in Wajo Dictict, Indonesia. International Journal of Economic Research, Vol. 12, No.4, 2015. Wajo

- Makmur. 2015. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Perry, Martin. 2002. Mengembangkan Usaha Kecil. Jakarta: Murai Kencana.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2017 Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
- Tambunan, Tulus T.H. 2017. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wilantara. Rio F. dan Susilawati. 2016. Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM. Bandung: Refika Aditama
- Zimmerer, Thomas W. dkk. 2008. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang:  
Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003
- Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18/PER/M.KUMKM/IX/2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Skripsi:

Jalil, Ikram. 2017. Efektivitas Pemberdayaan Usaha Kecil pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Soppeng. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar : Universitas Negeri Makassar.

Herliansah, Pradytia. 2016. Implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Tangerang. Skripsi tidak diterbitkan. Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sumber Internet:

Aini, Nur. "Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Turun". 11 Desember 2017 <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/18/ouvlqv382-kontribusi-umkm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-diprediksi-turun>

Aini, Nur. "Gubernur BI: UMKM Jadi Sumber Baru Pertumbuhan Ekonomi". 11 Desember 2017. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/18/ouvb3t382-gubernur-bi-umkm-jadi-sumber-baru-pertumbuhan-ekonomi>

Rahmana, Arief. "Keragaman Definisi UMKM Di Indonesia". 17 Desember 2017. <https://infoUMKM.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-UMKM-di-indonesia/>